

Integrasi Konsep *Homo Religiosus* Dalam Pendidikan Perdamaian: Studi Literatur Pada Konteks Pluralisme

Nurul Agna Pratama^{1*}, Naupal Asnawi²

^{1,2}Universitas Indonesia, Indonesia

*nurulagnapratama@gmail.com

Submit
5 Maret 2026

Review
16 Maret 2026

Publish
20 Maret 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi konsep *homo religiosus* dalam pendidikan perdamaian pada konteks pluralisme religius guna membangun fondasi konseptual yang lebih utuh dan kontekstual. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur sistematis. Data dikumpulkan dari artikel jurnal bereputasi internasional lima tahun terakhir serta karya klasik *The Sacred and the Profane* sebagai landasan antropologi religius. Proses pengumpulan dilakukan melalui tahap identifikasi, penyaringan, dan seleksi berbasis kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Analisis data menggunakan analisis isi kualitatif dan sintesis konseptual secara iteratif untuk membangun model integratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian kontemporer cenderung bersifat instrumental dan normatif, dengan penekanan pada keterampilan dialog dan kerangka hak asasi manusia, namun belum memadai dalam mengelaborasi dimensi antropologis manusia sebagai pencari makna. Integrasi konsep *homo religiosus* memperluas paradigma pendidikan perdamaian dari pendekatan teknis menuju pendekatan antropologis yang menempatkan kesadaran religius sebagai bagian dari struktur identitas. Simpulannya, pendidikan perdamaian akan lebih berkelanjutan dalam masyarakat plural apabila berakar pada pengakuan terhadap manusia sebagai makhluk pencari makna, sehingga toleransi tumbuh sebagai kesadaran etis, bukan sekadar kepatuhan normatif.

Kata Kunci: homo religiosus, pendidikan perdamaian, pluralisme religius

Abstract

*This study aims to analyze the integration of the concept of homo religiosus into peace education within the context of religious pluralism in order to construct a more coherent and contextual conceptual foundation. The research employs a qualitative approach with a systematic literature review design. Data were collected from peer reviewed international journal articles published in the last five years and from the classical work *The Sacred and the Profane* as a foundational reference in religious anthropology. The collection process involved identification, screening, and final selection based on rigorous inclusion and exclusion criteria. Data were analyzed through qualitative content analysis and iterative conceptual synthesis to formulate an integrative framework. The findings indicate that contemporary peace education is largely instrumental and normatively grounded in human rights and global citizenship paradigms, emphasizing dialogue skills while lacking a robust anthropological foundation. Integrating the concept of homo religiosus shifts the paradigm from a technical orientation toward an anthropological one that recognizes religious consciousness as integral to identity formation. In conclusion, peace education in plural societies becomes more sustainable when grounded in an understanding of human beings as meaning seeking subjects, allowing tolerance to emerge as ethical awareness rather than mere normative compliance.*

Keywords: homo religiosus, peace education, religious pluralism

PENDAHULUAN

Pluralisme keagamaan bukan lagi sekadar karakter sosial masyarakat kontemporer, melainkan kondisi struktural yang membentuk dinamika politik, budaya, dan pendidikan global. Keberadaan berbagai komunitas iman dalam satu ruang sosial yang sama menghasilkan

kemungkinan dialog sekaligus potensi konflik yang terus berulang dalam berbagai bentuk. Berbagai laporan mutakhir menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan beragama (Rifa'i & Azizah, 2025), diskriminasi terhadap kelompok minoritas (Mubarrak & Kumala, 2020), serta mobilisasi identitas religius dalam kontestasi politik masih menjadi fenomena yang meluas (Sukrisman et al., 2026). Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, konflik berbasis agama kerap berkelindan dengan kepentingan politik lokal dan ekonomi, sehingga memperlihatkan bahwa persoalan pluralisme bukan hanya persoalan teologis, tetapi juga persoalan konstruksi identitas dan distribusi kekuasaan (Wahyono et al., 2024).

Kompleksitas ini semakin diperkuat oleh transformasi ruang publik di era digital. Produksi dan sirkulasi opini mengenai agama tidak lagi dimediasi secara ketat oleh institusi formal, melainkan berlangsung secara horizontal melalui media sosial dan platform digital (Pimay & Riyadi, 2023). Akibatnya, interpretasi keagamaan, klaim kebenaran, maupun provokasi identitas dapat menyebar secara masif dan cepat. Friksi sosial tidak hanya terjadi dalam arena politik, tetapi juga dalam perdebatan tentang keyakinan dan moralitas. Polarisasi yang muncul sering kali memperlihatkan bahwa identitas religius berfungsi sebagai penanda batas sosial yang kuat (Faizin, 2024). Dengan demikian, pluralisme kontemporer bukan sekadar fakta keberagaman, tetapi medan negosiasi makna yang intens.

Dalam konteks ini, pendidikan sering diposisikan sebagai instrumen strategis untuk membangun orientasi inklusif terhadap perbedaan (Azzahra et al., 2026). Pendidikan perdamaian berkembang sebagai pendekatan yang menekankan dialog, empati, dan resolusi konflik non kekerasan (Tular & Manik, 2022). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mengurangi prasangka dan meningkatkan keterampilan komunikasi lintas kelompok. Namun, sebagian besar literatur pendidikan perdamaian kontemporer masih bertumpu pada paradigma normatif berbasis hak asasi manusia dan kewargaan global. Paradigma ini penting, tetapi cenderung memahami konflik sebagai persoalan kurangnya kompetensi sosial atau kegagalan komunikasi.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana pendidikan memahami hakikat manusia sebagai subjek pembelajaran dalam masyarakat plural religius (Wilujeng et al., 2022). Banyak pendekatan pendidikan perdamaian berfokus pada strategi pedagogis tanpa mengelaborasi fondasi antropologis tentang manusia yang dididik. Padahal dalam masyarakat yang religius, orientasi nilai individu sering kali dibentuk oleh keyakinan dan pengalaman spiritual yang memberi makna pada kehidupannya. Tanpa mempertimbangkan dimensi tersebut, pendidikan perdamaian berisiko hanya menghasilkan kepatuhan normatif, bukan transformasi kesadaran.

Di sinilah konsep *homo religiosus* memperoleh relevansinya. Manusia dipahami sebagai makhluk yang secara inheren mencari makna dan mengorientasikan hidupnya pada sesuatu yang dianggap sakral (Eliade, 1957/1987). Religiusitas dalam pengertian ini bukan sekadar atribut sosial, tetapi struktur kesadaran yang membentuk relasi manusia dengan dirinya, dengan orang lain, dan dengan dunia. Dengan menempatkan manusia sebagai pencari makna, konflik berbasis agama tidak lagi dipahami semata sebagai kegagalan dialog, tetapi sebagai benturan orientasi makna yang mendalam.

Telaah sistematis terhadap literatur menunjukkan bahwa integrasi eksplisit antara antropologi religius dan pendidikan perdamaian masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menekankan inovasi metode pembelajaran daripada rekonstruksi fondasi teoretis tentang manusia. Kekosongan ini menunjukkan adanya celah konseptual dalam kajian pendidikan perdamaian. Penelitian ini mengambil posisi dalam celah tersebut dengan menawarkan sintesis antara antropologi religius dan pendidikan perdamaian, sehingga pluralisme tidak dipahami hanya sebagai fakta sosial yang harus dikelola, tetapi sebagai ruang perjumpaan antar pencari makna.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merumuskan integrasi konsep *homo religiosus* dalam pendidikan perdamaian pada konteks pluralisme religius melalui studi literatur sistematis, guna memperkuat fondasi antropologis dan etis dalam pengembangan pendidikan yang berkelanjutan. Argumen utama yang dikembangkan adalah bahwa pendidikan perdamaian akan lebih kontekstual dan berkelanjutan apabila didasarkan pada pengakuan terhadap struktur kesadaran religius manusia. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada reposisi pendidikan perdamaian dari paradigma yang dominan teknis menuju kerangka antropologis yang lebih

mendasar. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berupaya memperluas horizon konseptual pendidikan perdamaian dalam masyarakat plural religius kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur sistematis yang bertujuan membangun sintesis konseptual mengenai integrasi konsep *homo religiosus* dalam pendidikan perdamaian pada konteks pluralisme. Penelitian ini tidak dilakukan pada lokasi fisik tertentu, melainkan berbasis penelusuran data melalui basis data akademik daring, dengan pelaksanaan pada periode Januari hingga Maret 2026. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran numerik, melainkan pada pemahaman makna, penafsiran konsep, serta perumusan kerangka teoretis yang argumentatif dan koheren (Creswell & Poth, 2018). Desain studi literatur sistematis digunakan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis sumber dilakukan secara terstruktur, transparan, serta dapat direplikasi secara akademik. Pendekatan ini relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pengembangan model konseptual, bukan pada pengujian hipotesis empiris.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, serta satu karya klasik yang menjadi landasan antropologi religius. Sumber data diperoleh melalui basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar dengan kata kunci utama yang berkaitan dengan *homo religiosus*, pendidikan perdamaian, pluralisme, dan religiusitas dalam pendidikan. Populasi penelitian ini mencakup seluruh artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian yang teridentifikasi melalui proses penelusuran awal. Berdasarkan proses penyaringan dan seleksi sesuai kriteria yang ditetapkan, diperoleh 30 artikel yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai sampel akhir untuk dianalisis secara mendalam. Kriteria inklusi mencakup artikel yang melalui proses penelaahan sejawat, relevan secara tematik, dan memiliki kontribusi teoretis yang jelas, sedangkan kriteria eksklusi mencakup tulisan populer, opini non-ilmiah, dan artikel yang tidak memiliki kejelasan metodologis. Penetapan kriteria ini penting untuk menjaga kualitas dan validitas sintesis literatur (Booth et al., 2022). Kriteria tersebut diterapkan secara sistematis dalam seluruh tahapan seleksi untuk memastikan bahwa setiap sumber yang dianalisis memiliki relevansi konseptual dan kualitas akademik yang memadai.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi, penyaringan, dan seleksi akhir. Tahap identifikasi dilakukan dengan menelusuri artikel berdasarkan kombinasi kata kunci dan rentang tahun publikasi lima tahun terakhir. Tahap penyaringan dilakukan dengan membaca judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian topik dengan fokus penelitian. Tahap seleksi akhir dilakukan melalui pembacaan menyeluruh terhadap artikel yang lolos penyaringan awal guna memastikan relevansi konseptual dan kualitas argumentasi ilmiahnya. Alur ini mengikuti prinsip transparansi dalam studi literatur sistematis yang menekankan kejelasan prosedur dan akuntabilitas akademik (Page et al., 2021).

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi kualitatif dan sintesis konseptual. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan hakikat manusia religius, tujuan pendidikan perdamaian, serta tantangan pluralisme dalam masyarakat kontemporer. Selanjutnya, sintesis konseptual dilakukan dengan menghubungkan dan mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber ke dalam satu kerangka teoretis yang sistematis dan argumentatif. Proses analisis dilakukan secara iteratif, yaitu dengan membaca, membandingkan, mengelompokkan, dan merumuskan hubungan antar konsep hingga diperoleh model integratif yang konsisten dengan tujuan penelitian. Penelitian ini tidak melakukan pengukuran variabel secara kuantitatif karena fokusnya terletak pada pengembangan kerangka pemikiran yang dapat menjadi dasar bagi praktik pendidikan perdamaian dalam masyarakat plural. Melalui prosedur metodologis ini, penelitian diharapkan menghasilkan sintesis konseptual yang kuat, transparan, serta relevan secara teoritis dan praktis bagi pengembangan pendidikan yang berorientasi pada dialog dan kehidupan sosial yang damai.

HASIL

Analisis sistematis terhadap literatur 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian dalam masyarakat plural telah berkembang secara signifikan pada tingkat metodologis, namun masih menghadapi persoalan mendasar pada tingkat fondasi konseptualnya.

Sintesis tematik yang dilakukan terhadap berbagai artikel bereputasi memperlihatkan bahwa problem utama bukan terletak pada kurangnya strategi pembelajaran atau inovasi kurikulum, melainkan pada cara pendidikan perdamaian memahami hakikat manusia yang menjadi subjeknya. Dengan kata lain, terjadi ketidakseimbangan antara penguatan pendekatan pembelajaran dan pendalaman pemahaman antropologis mengenai manusia dalam konteks pluralisme religius.

Temuan pertama menunjukkan dominasi pendekatan instrumental dalam pendidikan perdamaian kontemporer (Omer, 2021). Literatur mutakhir secara konsisten menekankan pentingnya pengembangan kompetensi dialog, empati sosial, kerja sama lintas kelompok, serta keterampilan resolusi konflik sebagai inti pendidikan perdamaian (Saleh et al., 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan reflektif mampu menurunkan prasangka serta meningkatkan sikap inklusif individu (Larson & Lewis, 2025). Pendidikan perdamaian dalam kerangka ini dipahami sebagai proses pembentukan keterampilan sosial yang memungkinkan individu berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat majemuk.

Namun sintesis yang dilakukan memperlihatkan bahwa pendekatan tersebut beroperasi dalam paradigma yang melihat perdamaian sebagai hasil dari teknik yang tepat. Perdamaian dipahami sebagai kondisi eksternal yang dapat dihasilkan melalui intervensi pedagogis yang sistematis. Fokusnya terletak pada bagaimana mengurangi konflik, bukan pada bagaimana manusia memaknai perbedaan. Pendekatan ini memang penting dan relevan, tetapi cenderung menyederhanakan kompleksitas konflik yang berakar pada identitas dan keyakinan. Dalam konteks masyarakat religius, perbedaan tidak selalu dipahami sebagai persoalan komunikasi atau miskomunikasi, melainkan sebagai persoalan makna dan kebenaran yang diyakini secara mendalam.

Temuan kedua menunjukkan bahwa paradigma pluralisme yang mendasari pendidikan perdamaian banyak bertumpu pada prinsip kewargaan global dan hak asasi manusia sebagai landasan normative (Puspawati & Arjana, 2025). Pendekatan ini memperkuat gagasan kesetaraan, penghormatan terhadap keberagaman, dan pengakuan terhadap hak individu sebagai bagian dari masyarakat demokratis. Secara teoritis, paradigma ini menawarkan fondasi yang kuat bagi kehidupan sosial yang damai. Namun sintesis literatur memperlihatkan adanya ketegangan antara paradigma normatif sekuler dan realitas masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh orientasi religius (Jong, 2025).

Penelitian tentang religiusitas kontemporer menunjukkan bahwa identitas keagamaan tetap menjadi sumber utama pembentukan makna hidup dan orientasi moral generasi muda (Harold et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa bagi banyak individu, nilai dan sikap sosial tidak hanya ditentukan oleh norma hukum atau prinsip kewargaan, tetapi juga oleh keyakinan spiritual yang membentuk struktur kesadaran mereka. Ketika pendidikan perdamaian hanya menekankan norma universal tanpa mengintegrasikan dimensi religius tersebut, maka nilai toleransi sering dipahami sebagai kewajiban eksternal. Individu dapat memahami pentingnya menghormati perbedaan secara rasional, tetapi belum tentu menginternalisasinya sebagai bagian dari kerangka nilai yang membentuk identitasnya.

Fakta empiris mengenai meningkatnya ketegangan berbasis identitas agama di berbagai negara memperkuat temuan ini (Amin, 2025; Beaglehole et al., 2025; Suntay, 2025; Wilkins-Laflamme et al., 2025). Konflik yang muncul tidak selalu disebabkan oleh kurangnya keterampilan komunikasi, melainkan oleh cara individu memahami kebenaran dan identitasnya. Ketika perbedaan dipahami sebagai ancaman terhadap makna hidup yang diyakini, maka pendekatan teknis tidak cukup untuk meredakan ketegangan. Dengan demikian, persoalan pendidikan perdamaian dalam masyarakat plural bukan semata persoalan metode, tetapi persoalan fondasi konseptual tentang manusia.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa kekosongan tersebut berakar pada absennya fondasi antropologis religius dalam konstruksi pendidikan perdamaian. Literatur pendidikan mutakhir jarang mengkaji manusia sebagai makhluk pencari makna yang memiliki orientasi transenden. Padahal dalam perspektif antropologi religius klasik, manusia dipahami sebagai makhluk yang secara kodrati mengarahkan dirinya pada sesuatu yang dianggap sakral dan bermakna. Perspektif ini menempatkan religiusitas bukan sekadar praktik ritual atau identitas formal, tetapi sebagai struktur kesadaran yang memengaruhi cara manusia memaknai diri dan orang lain.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengakuan terhadap dimensi pencarian makna memiliki pengaruh penting bagi pengembangan pendidikan perdamaian. Jika manusia dipahami sebagai *homo religiosus*, maka dialog lintas iman tidak hanya menjadi cara untuk menjaga harmoni sosial, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap proses setiap individu dalam mencari dan membangun keyakinannya. Dalam perspektif ini, pluralisme tidak sekadar dipahami sebagai keberagaman yang ada di masyarakat, melainkan sebagai ruang perjumpaan antar individu yang masing-masing memiliki perjalanan nilai dan keyakinan yang berbeda.

Temuan keempat memperlihatkan bahwa integrasi konsep *homo religiosus* menghasilkan pergeseran paradigma dalam memahami pendidikan perdamaian. Pergeseran ini tidak sekadar menambahkan perspektif agama dalam kurikulum, tetapi merekonstruksi fondasi konseptualnya. Jika pendekatan instrumental bertanya bagaimana mengelola konflik, maka pendekatan antropologis religius bertanya siapa manusia yang hidup dalam pluralitas tersebut dan bagaimana ia memaknai perbedaan. Pergeseran ini mengubah titik tolak pendidikan dari teknik menuju kesadaran.

Penelitian mengenai pendidikan dalam konteks pascakonflik menunjukkan bahwa perubahan sikap yang lebih tahan lama terjadi ketika proses pembelajaran menyentuh aspek identitas yang paling bermakna bagi individu. Aspek tersebut dalam banyak kasus berkaitan dengan keyakinan religius (Mashuri et al., 2024; Shahab et al., 2022). Ketika pengalaman spiritual diakui sebagai bagian dari identitas tersebut, dialog lintas iman berlangsung dengan keterbukaan yang lebih tulus dan mendalam. Individu yang belajar tidak lagi berdialog hanya karena tuntutan norma sosial, tetapi karena memahami bahwa orang lain juga memiliki keyakinan dan pengalaman hidup yang layak dihargai (Kurniawan et al., 2025).

Hasil analisis ini mengarah pada kebutuhan untuk memperluas kerangka pendidikan perdamaian. Dalam masyarakat plural yang religius, pendidikan perdamaian perlu berpijak pada pemahaman bahwa manusia adalah individu yang mencari dan membangun makna hidupnya. Tanpa pijakan tersebut, pendidikan perdamaian berisiko berhenti pada tata cara dialog yang efektif dalam jangka pendek, tetapi kurang kuat ketika menghadapi konflik yang lebih mendalam. Integrasi perspektif antropologi religius membantu memberikan arah etis yang lebih relevan dengan konteks masyarakat yang religius.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa tantangan utama pendidikan perdamaian bukan hanya pada keterbatasan strategi pembelajaran, tetapi pada cara memahami manusia yang belum sepenuhnya utuh. Integrasi konsep *homo religiosus* tidak dimaksudkan sebagai tambahan perspektif semata, melainkan sebagai upaya memperjelas dasar pemikiran pendidikan perdamaian itu sendiri. Melalui pendekatan ini, toleransi dipahami sebagai hasil dari kemampuan memahami pengalaman hidup orang lain, dialog dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap perbedaan keyakinan, dan perdamaian dipandang sebagai sikap batin yang tumbuh dari kesadaran nilai yang diyakini setiap individu.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian akan lebih kontekstual dan berkelanjutan dalam masyarakat plural yang religius apabila didasarkan pada pemahaman tentang manusia sebagai *homo religiosus*. Sintesis literatur memperlihatkan bahwa pendekatan ini membantu mempertemukan nilai-nilai universal tentang toleransi dengan pengalaman religius yang dijalani secara personal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian pendidikan perdamaian, tetapi juga menawarkan kerangka pemikiran yang lebih selaras dengan dinamika sosial dan kehidupan beragama masyarakat kontemporer.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi konsep *homo religiosus* dalam pendidikan perdamaian pada konteks pluralisme melalui studi literatur sistematis, dengan maksud membangun kerangka konseptual yang lebih kontekstual bagi masyarakat religius. Berdasarkan hasil temuan, pembahasan ini diarahkan untuk menjawab apakah dan sejauh mana integrasi tersebut mampu memperkuat fondasi etis pendidikan perdamaian serta memberikan kontribusi teoretis yang relevan.

Temuan pertama menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian kontemporer sebagian besar berkembang dalam kerangka yang bersifat instrumental, dengan penekanan utama pada penguatan keterampilan sosial seperti dialog, empati, dan resolusi konflik. Pendekatan ini secara

pedagogis memiliki kontribusi yang nyata. Berbagai studi memperlihatkan bahwa pembelajaran berbasis dialog mampu menurunkan prasangka, memperkuat sikap toleran, dan meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola perbedaan secara konstruktif. Dalam konteks ruang kelas yang plural, strategi ini efektif membangun suasana interaksi yang lebih inklusif (Larson & Lewis, 2025). Namun demikian, orientasi yang terlalu bertumpu pada keterampilan sosial berpotensi membatasi pendidikan perdamaian pada ranah prosedural, yakni bagaimana berinteraksi secara damai, tanpa secara mendalam membahas mengapa perbedaan itu dimaknai secara tertentu oleh individu.

Keterbatasan tersebut menjadi semakin terlihat dalam masyarakat yang religius. Dalam konteks semacam ini, sikap terhadap perbedaan tidak hanya dibentuk oleh kemampuan komunikasi, tetapi juga oleh struktur nilai dan keyakinan yang telah menjadi bagian dari identitas diri. Pendidikan perdamaian yang hanya menekankan teknik dialog dapat menghasilkan perilaku toleran dalam situasi terkontrol, tetapi belum tentu membentuk pemahaman reflektif ketika individu menghadapi isu yang menyentuh keyakinan yang dianggap paling mendasar. Dengan kata lain, toleransi yang dibangun melalui pelatihan keterampilan belum tentu berakar pada kesadaran nilai yang stabil. Di sinilah tampak bahwa persoalan utama bukan sekadar kurangnya strategi pembelajaran, melainkan belum optimalnya pemahaman tentang manusia sebagai subjek yang memaknai dunia melalui kerangka keyakinan tertentu.

Integrasi konsep *homo religiosus* menawarkan perluasan perspektif atas keterbatasan tersebut. Jika manusia dipahami sebagai makhluk yang secara inheren mencari dan membangun makna hidupnya, maka pendidikan perdamaian perlu memberi ruang bagi refleksi atas sumber nilai yang membentuk sikap terhadap perbedaan. Pendekatan ini tidak meniadakan pentingnya keterampilan dialog, tetapi melengkapinya dengan dimensi kesadaran diri yang lebih mendalam. Dengan demikian, pendidikan perdamaian tidak lagi berhenti pada penguatan kompetensi sosial, melainkan bergerak menuju pembentukan pemahaman yang lebih utuh tentang relasi antara keyakinan pribadi dan kehidupan bersama. Pergeseran ini menjadikan pendidikan perdamaian lebih kontekstual dalam masyarakat religius dan sekaligus memperkuat fondasi etisnya.

Temuan kedua menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian banyak dipengaruhi oleh paradigma pluralisme normatif yang bertumpu pada prinsip kewargaan global dan hak asasi manusia. Paradigma ini menyediakan dasar hukum dan politik yang penting dalam mengatur kehidupan bersama di tengah keberagaman (Puspawati & Arjana, 2025). Melalui pendekatan ini, perbedaan diposisikan dalam kerangka kesetaraan hak, kebebasan beragama, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam praktik pendidikan, kerangka tersebut diterjemahkan ke dalam penguatan nilai toleransi, non diskriminasi, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai bagian dari komitmen kewargaan. Secara struktural, pendekatan ini memberikan legitimasi yang kuat bagi pendidikan perdamaian dalam sistem pendidikan modern.

Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan normatif tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan batin terhadap perbedaan. Konflik berbasis agama sering kali tidak muncul karena ketiadaan aturan, melainkan karena adanya persepsi ancaman terhadap identitas dan keyakinan yang dianggap mendasar (Anwar et al., 2024; Kambo & Yani, 2021; Setiawan et al., 2022). Dalam situasi semacam ini, regulasi hukum dan pendidikan kewargaan dapat mengatur perilaku, tetapi belum tentu menyentuh sumber kecemasan atau resistensi yang berakar pada struktur makna individu. Hal ini mengindikasikan bahwa pluralisme sebagai norma belum sepenuhnya menjawab pluralisme sebagai pengalaman hidup. Dengan kata lain, kesepakatan formal tentang toleransi tidak otomatis menghasilkan kesiapan personal untuk menerima keberagaman secara mendalam.

Integrasi konsep *homo religiosus* menjadi signifikan dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Jika manusia dipahami sebagai individu yang mengorientasikan hidupnya pada nilai yang dianggap sakral atau bermakna tinggi, maka dialog antaragama tidak cukup didasarkan pada kewajiban hukum semata, tetapi perlu tumbuh dari pengakuan terhadap kedalaman pengalaman keyakinan masing-masing. Pendekatan ini membantu memindahkan fokus dari sekadar kepatuhan terhadap norma menuju pemahaman reflektif tentang mengapa nilai tertentu begitu penting bagi seseorang. Dengan demikian, pendidikan perdamaian memperoleh dimensi yang lebih personal dan kontekstual. Kerangka normatif tetap dipertahankan, tetapi diperkaya oleh kesadaran bahwa keberagaman bukan hanya persoalan hak, melainkan juga persoalan makna dan identitas.

Temuan ketiga menunjukkan adanya kekosongan antropologis dalam literatur pendidikan perdamaian. Banyak kajian menyoroti strategi pembelajaran, tetapi jarang mendiskusikan siapa manusia yang hendak dibentuk. Padahal dalam tradisi antropologi religius, manusia dipahami sebagai makhluk yang selalu menafsirkan dunia melalui horizon makna yang melampaui dirinya (Eliade, 1957/1987). Perspektif ini menemukan resonansinya dalam penelitian pendidikan kontemporer yang menekankan pentingnya dimensi subjektivitas dan pengalaman batin dalam proses belajar (Kieliszek, 2025). Integrasi *homo religiosus* tidak dimaksudkan untuk mengembalikan pendidikan pada dogmatisme, tetapi untuk mengakui bahwa kesadaran religius merupakan bagian dari struktur identitas yang tidak dapat diabaikan dalam masyarakat plural. Dengan mengakui struktur ini, pendidikan perdamaian menjadi lebih realistis terhadap kondisi sosial.

Temuan keempat menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian memiliki potensi menghasilkan perubahan sikap yang lebih bertahan lama ketika dimensi religius dihadirkan secara sadar dan reflektif dalam proses pembelajaran. Berbagai penelitian pada konteks pascakonflik memperlihatkan bahwa transformasi yang mendalam tidak terjadi semata melalui penyampaian materi tentang toleransi, tetapi melalui proses refleksi atas identitas diri, pengalaman luka, serta narasi personal yang membentuk cara individu memandang kelompok lain. Proses ini memungkinkan individu memahami kembali posisi dirinya sebelum memasuki dialog dengan pihak yang berbeda (Mashuri et al., 2024; Shahab et al., 2022). Dengan demikian, perubahan yang terjadi tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menyentuh lapisan pengalaman yang lebih personal.

Dalam masyarakat religius, pembentukan identitas hampir selalu berkaitan dengan keyakinan dan pengalaman spiritual (Gaitano et al., 2025; Gurba et al., 2022). Nilai-nilai yang dianggap suci atau bermakna tinggi menjadi bagian dari cara individu menafsirkan realitas sosial. Jika dimensi ini diabaikan, pendidikan perdamaian berisiko membangun dialog yang bersifat formal dan situasional. Sebaliknya, ketika pengalaman spiritual diakui sebagai bagian dari struktur identitas, dialog menjadi lebih jujur dan terbuka karena individu tidak diminta meninggalkan keyakinannya, melainkan diajak memahami bagaimana keyakinan tersebut membentuk cara pandangnya. Pendekatan ini menciptakan ruang aman untuk mengakui perbedaan tanpa merasa terancam.

Integrasi konsep *homo religiosus* memperkuat arah tersebut dengan menempatkan pencarian makna sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pendidikan tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana meredakan konflik, tetapi sebagai ruang pembentukan kesadaran diri yang memungkinkan individu melihat keterkaitan antara keyakinan pribadi dan tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan ini, toleransi tumbuh bukan sekadar sebagai kewajiban normatif, melainkan sebagai hasil dari pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan orang lain. Dengan demikian, pendidikan perdamaian memperoleh dimensi transformasional yang lebih berkelanjutan dalam konteks masyarakat plural yang religius.

Apabila dirujuk kembali pada tujuan penelitian, integrasi konsep *homo religiosus* menghasilkan tiga kontribusi utama. Pertama, kontribusi teoretis berupa rekonstruksi fondasi pendidikan perdamaian dari paradigma teknis menuju paradigma antropologis. Kedua, kontribusi konseptual berupa penguatan basis etis pluralisme melalui pengakuan terhadap pengalaman religius sebagai sumber nilai. Ketiga, kontribusi praktis berupa implikasi bagi desain kurikulum yang mendorong refleksi identitas secara kritis dan dialogis.

Secara kritis, integrasi ini juga perlu dipahami dengan hati-hati agar tidak berubah menjadi legitimasi eksklusivisme. Literatur mutakhir tentang agama dan ruang publik menunjukkan bahwa religiusitas dapat berfungsi inklusif maupun eksklusif tergantung pada bagaimana ia dimaknai (Aqila, 2024). Oleh karena itu, pendidikan perdamaian berbasis *homo religiosus* disertai pendekatan reflektif yang mendorong keterbukaan, bukan penguatan klaim absolut. Dalam kerangka ini, religiusitas dipahami sebagai orientasi makna, bukan sebagai superioritas identitas.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi konsep *homo religiosus* bukan sekadar tambahan terminologis dalam pendidikan perdamaian, melainkan rekonstruksi epistemologis tentang siapa manusia yang dididik. Dalam masyarakat plural yang religius, perdamaian tidak dapat dibangun hanya melalui regulasi dan teknik komunikasi. Ia harus tumbuh

dari kesadaran bahwa setiap individu adalah pencari makna yang layak dihormati. Kesadaran inilah yang menjadi fondasi dialog yang lebih dalam dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi konsep *homo religiosus* memperkaya landasan etis pendidikan perdamaian serta memperluas kerangka teoretisnya agar lebih selaras dengan realitas masyarakat plural yang religius. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada pergeseran fokus pendidikan perdamaian dari pendekatan yang dominan teknis menuju pemahaman yang lebih mendasar tentang manusia sebagai makhluk pencari makna. Pergeseran ini membuka kemungkinan bagi pendidikan perdamaian untuk berkembang tidak hanya sebagai strategi pengelolaan perbedaan, tetapi sebagai proses pembentukan kesadaran yang menghargai kedalaman nilai dan keyakinan setiap individu.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian dalam konteks pluralisme religius belum sepenuhnya memiliki kerangka konseptual yang memadai untuk memahami manusia sebagai subjek yang memaknai hidup melalui nilai dan keyakinan. Meskipun pendekatan yang berkembang telah efektif dalam memperkuat keterampilan dialog dan empati, dimensi pencarian makna yang membentuk identitas religius subjek pembelajaran masih kurang mendapat perhatian. Integrasi konsep *homo religiosus* memperluas cakupan pendidikan perdamaian dengan menempatkan manusia sebagai makhluk pencari makna, sehingga toleransi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban sosial, tetapi sebagai kesadaran etis yang lahir dari pengakuan terhadap kedalaman nilai diri dan orang lain.

Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan perdamaian dalam masyarakat plural tidak memadai jika hanya mengandalkan strategi pengelolaan perbedaan, melainkan memerlukan pembentukan kesadaran yang menghargai dimensi religius manusia. Dengan pemahaman yang lebih utuh tentang hakikat manusia, pluralisme tidak lagi dipahami secara dangkal sebagai keberagaman yang harus diterima, tetapi sebagai ruang perjumpaan antar individu yang sama-sama memiliki orientasi makna dalam hidupnya. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual pendidikan perdamaian dari pendekatan yang dominan teknis menuju pendekatan yang lebih berakar pada pemahaman tentang manusia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini bersifat konseptual karena berbasis studi literatur, sehingga belum menguji secara empiris efektivitas integrasi konsep *homo religiosus* dalam praktik pendidikan perdamaian. Kedua, keterbatasan pada sumber yang dianalisis, khususnya pembatasan pada artikel lima tahun terakhir, berpotensi mengabaikan beberapa karya relevan di luar rentang tersebut. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis empiris diperlukan untuk menguji validitas dan implementasi kerangka konseptual yang dihasilkan dalam konteks pendidikan yang nyata.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, pengembangan pendidikan perdamaian dalam masyarakat plural religius perlu diarahkan pada perancangan pembelajaran yang memberi ruang refleksi terhadap identitas dan sumber nilai yang membentuk diri individu. Praktik pendidikan tidak cukup hanya menekankan keterampilan dialog dan kerja sama, tetapi perlu mendorong proses memahami diri secara lebih mendalam agar dialog yang terbangun tidak bersifat formal, melainkan lahir dari kesadaran yang autentik. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dapat mempertimbangkan integrasi kegiatan reflektif, diskusi lintas keyakinan yang terstruktur, serta penguatan literasi keagamaan yang dialogis dalam kurikulum pendidikan perdamaian.

Secara teoretis, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan kerangka konseptual pendidikan perdamaian yang lebih berakar pada pemahaman tentang manusia sebagai makhluk pencari makna. Pengembangan teori ke depan dapat mengeksplorasi hubungan antara kesadaran religius, pembentukan identitas, dan konstruksi sikap dialogis secara lebih sistematis. Integrasi antropologi religius dalam kajian pendidikan perdamaian juga dapat diperdalam melalui pendekatan interdisipliner yang melibatkan filsafat pendidikan, sosiologi agama, dan psikologi perkembangan moral.

Untuk penelitian lanjutan, diperlukan studi empiris yang menguji bagaimana integrasi dimensi religius dalam pembelajaran benar-benar memengaruhi sikap toleransi dan keterbukaan dalam konteks yang berbeda. Penelitian berbasis lapangan, baik melalui pendekatan kualitatif

maupun kuantitatif, dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai efektivitas model pendidikan perdamaian yang berlandaskan pemahaman tentang manusia sebagai makhluk pencari makna. Selain itu, kajian komparatif antar wilayah atau tradisi keagamaan juga penting dilakukan untuk melihat bagaimana konsep ini beradaptasi dalam konteks sosial yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. (2025). Deadly tensions: The enduring impact of ethnic and religious diversity on lethal violence in the united States 1945–2023. *Crime, Law and Social Change*, 83(1), 51. <https://doi.org/10.1007/s10611-025-10233-6>
- Anwar, S., Alwalid, M. A., & Nizar, N. (2024). The Aim of Religious Moderation is to Overcome Identity Conflicts. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 3(1), 10–23. <https://doi.org/10.59683/ijls.v3i1.68>
- Aqila, H. J. (2024). Religiusitas dalam Ruang Publik Agama dan Politik di Era Kontemporer. *Socio Religia*, 5(1), 47–59. <https://doi.org/10.24042/sr.v5i1.21259>
- Azzahra, N. S., Fakhirah, R. A., & Azzahra, D. (2026). SOSIALISASI MENUMBUHKAN KESADARAN DAN SIKAP TOLERAN MELALUI KETERAMPILAN BERBAHASA KEPADA SISWA KELAS VI SEKOLAH DASAR NEGERI 007 PEKANBARU. *JURNAL KAJIAN PENDIDIKAN*, 8(1), 65–75.
- Beaglehole, B., Boden, J. M., Porter, R., Sulaiman-Hill, R., Ali, F., Dean, S., Adam, Z., Tanveer, S., Schluter, P. J., & Bell, C. (2025). Post-traumatic growth and religious coping in Muslims exposed to the March 15 terror attacks in New Zealand: A cross-sectional study. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 59(11), 1019–1026. <https://doi.org/10.1177/00048674251374461>
- Booth, A., Sutton, A., Clowes, M., Martyn-St James, M., & Booth, A. (2022). *Systematic approaches to a successful literature review* (Third edition). SAGE.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (Fourth edition). SAGE.
- Eliade, M. (1987). *The sacred and the profane: The nature of religion*. Harcourt, Brace & World. Inc. (Original work published 1957)
- Faizin, B. (2024). Polarization of Religious Issues in Indonesia's Social Media Society and Its Impact on Social Conflict. *Journal of Applied Data Sciences*, 6(1), 426–442. <https://doi.org/10.47738/jads.v6i1.447>
- Gaitano, N. G., Díaz-Dorransoro, J. M., Olukuru, J., & Cortes, R. Z. (2025). An international survey about young people, faith and religion: Framework of the research and overall results. *Church, Communication and Culture*, 10(3), 268–308. <https://doi.org/10.1080/23753234.2025.2584662>
- Gurba, E., Czyżowska, D., Topolewska-Siedzik, E., & Ciecuch, J. (2022). The Importance of Identity Style for the Level of Religiosity in Different Developmental Periods. *Religions*, 13(2), 157. <https://doi.org/10.3390/rel13020157>
- Harold, R., Balau, A., Ismail, K., Hamzah, M. W., & Maida, S. (2026). PERAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DALAM MEMBENTUK KARAKTER MAHASISWA JURUSAN SOSIOLOGI DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 3(1), 281–289. <https://doi.org/doi.org/10.61722/jmia.v3i1.7765>
- Jong, A. (2025). The Post-Secular Cosmopolitanization of Religion. *Religions*, 16(3), 334. <https://doi.org/10.3390/rel16030334>
- Kambo, G., & Yani, A. A. (2021). Political Identity and Religious Prejudice in a Post-Conflict Society: A Case Study of Poso, Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(3), 519–527. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.3.43>
- Kieliszek, Z. (2025). Religious experience and the philosophy of subjectivity: How faith shapes perception of reality. *Pharos Journal of Theology*, (106.3). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.3021>
- Kurniawan, P., Nasution, L. R., & Ahmatnihar. (2025). Cultivating Harmony: Strengthening Religious Inclusivity Through Interfaith Dialogue in Rural South Tapanuli. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 21(1), 84–98. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v21i1.24161>

- Larson, J. M., & Lewis, J. I. (2025). Reducing Prejudice toward Refugees: Evidence That Social Networks Influence Attitude Change in Uganda. *American Political Science Review*, 119(1), 349–367. <https://doi.org/10.1017/S0003055424000303>
- Mashuri, S., Futaqi, S., Hasanuddin, M. I., Yusuf, K., Rusdin, Takunas, R., Bahdar, Dwicahyanti, R., & Dwitama Haeba, I. (2024). The building sustainable peace through multicultural religious education in the contemporary era of Poso, Indonesia. *Cogent Education*, 11(1), 2389719. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2389719>
- Mubarrak, H., & Kumala, I. D. (2020). DISKRIMINASI TERHADAP AGAMA MINORITAS: STUDI KASUS DI BANDA ACEH. *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah*, 3(2), 42–60. <https://doi.org/10.24815/s-jpu.v3i2.17553>
- Omer, A. (2021). Religion and the Study of Peace: Practice without Reflection. *Religions*, 12(12), 1069. <https://doi.org/10.3390/rel12121069>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pimay, A., & Riyadi, A. (2023). Virtual Religious Conflict: From Cyberspace to Reality. *HTS Theologies Studies / Theological Studies*, 79(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8639>
- Puspawati, S., & Arjana, I. B. M. (2025). Ethical foundations in religious pluralism: Epistemological perspectives for interfaith education in a globalized world. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 13(2), 454–465. <https://doi.org/10.29210/1153800>
- Rifa'i, J., & Azizah, N. (2025). Pembatasan Kegiatan Keagamaan oleh Pemerintah Daerah: Konstitusionalitas dan Prinsip Negara Hukum. 4(1), 79–92. <https://doi.org/10.35719/constitution.v4i2.134>
- Saleh, M. N. I., Hanum, F., & Rukiyati. (2025). Approaches to implementing peace education in high schools for nonviolent conflict resolution. *Cogent Education*, 12(1), 2553004. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2553004>
- Setiawan, T., Tjandraningtyas, J. M., Kuntari, C. M. I. S., Rahmani, K., Maria, C., Indrianie, E., Puspitasari, I., & Dwijayanthi, M. (2022). Memory of Conflicts and Perceived Threat as Relevant Mediators of Interreligious Conflicts. *Religions*, 13(3), 250. <https://doi.org/10.3390/rel13030250>
- Shahab, S., Ullah, D. S., & Akhter, D. N. (2022). The Role Of Education In Post-Conflict Peace Building: Learner Perspectives From Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *Webology*, 19(2), 542–563.
- Sukrisman, A., Bahar, M. Y., & Pedagogik, P. (2026). Politik Identitas Berbasis Agama dalam Kontestasi Politik Lokal di Kota Sorong. 13(1), 13–18.
- Suntay, O. (2025). Government Religious Discrimination, Support of Religion, and Muslim Minority-Related Societal Violence in Western Democracies. *Comparative Political Studies*, 58(4), 746–784. <https://doi.org/10.1177/00104140241252077>
- Tular, N. I., & Manik, J. S. (2022). Pendidikan Perdamaian bagi Remaja: Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik antar Umat Beragama. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, 5(1), 40–57. <https://doi.org/10.34081/fidei.v5i1.228>
- Wahyono, Z., Gamon, A. D., & Akbar Shah, M. (2024). Religious Tolerance in Southeast Asia: Issues and Challenges. *AL-ITQAN: JOURNAL OF ISLAMIC SCIENCES AND COMPARATIVE STUDIES*, 9(2), 24–53. <https://doi.org/10.31436/alitqan.v9i2.297>
- Wilkins-Laflamme, S., Voas, D., & Hewlett, K. (2025). Religious Polarization in Europe. *Sociology of Religion*, 86(3), 303–330. <https://doi.org/10.1093/socrel/srae017>
- Wilujeng, S. R., Syamsuddin, M. M., & Murtiningsih, R. S. (2022). Homo Religiosus dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. *HUMANIKA*, 29(2), 267–281. <https://doi.org/10.14710/humanika.v29i2.50625>